

## DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DITINJAU DARI PENDAPATAN DAERAH DAN TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH

Putri Puspita Ayu<sup>1</sup>, Tika Septiani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati  
[puspitaayu12@gmail.com](mailto:puspitaayu12@gmail.com); [tikapramana@gmail.com](mailto:tikapramana@gmail.com)

### **Abstract**

*Declining economic growth rate in West Java province for the last six years (2012-2016) resulted in the purchasing power of low society. This situation led to the weakening of economic activity in West Java province during this period, so it is necessary to do efforts to stimulate related parties especially the provincial government of West Java to be more centered on local economic empowerment to increase its regional revenues. This condition will have an impact on increasing economic growth. The purpose of this article was intended to examine the influence of indigenous revenue, transfer income, other legitimate revenues and the level of regional independence to economic growth in the province of West Java. This study uses a method of verificative. The population in this study was all the local governments of the regency and city of West Java in 2012-2017 and obtained 162 samples of research data consisting of 1 province, 26 districts and cities. The data analysis techniques in this study used multiple regression analyses. Based on the results of regression analysis showed that the economic growth rate of the district and the city of West Java province was significantly influenced by the regional original revenue (PAD), transfer income, other legitimate income, and the level of Regional independence.*

**Keyword:** *Economic growth; Local revenue; Transfer income; Other legitimate revenues; Level of independence*

### **Abstrak**

Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat selama enam tahun terakhir (2012-2016) menghasilkan daya beli masyarakat yang rendah. Situasi ini menyebabkan melemahnya kegiatan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu tersebut, sehingga perlu dilakukan upaya menstimulasi pihak terkait khususnya pemerintah provinsi Jawa Barat agar lebih terpusat pada pemberdayaan ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Kondisi tersebut akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tujuan artikel ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah dan tingkat kemandirian daerah terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Studi ini menggunakan metode verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pemerintah daerah Kabupaten dan kota Jawa Barat pada 2012-2017 dan diperoleh 162 sampel data penelitian yang terdiri dari 1 provinsi, 26 kabupaten dan kota. Teknik analisis data dalam kajian ini menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota Se-provinsi Jawa barat dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, pendapatan lain-lain yang sah, dan tingkat kemandirian daerah.

**Kata kunci :** *Pertumbuhan ekonomi; Pendapatan asli daerah; Pendapatan transfer; Lain-lain pendapatan yang sah; Tingkat kemandirian*

*Cronicle of Article: Received (October, 2019); Revised (November 2019); and Published (December 2019).  
©2019 Jurnal Kajian Akuntansi Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati.*

**Profil and corresponding author:** Putri Puspita Ayu and Tika Septiani are from Accounting Study Program, Faculty of Economy, Swadaya Gunung Jati University. *Corresponding Author:* [tikapramana@gmail.com](mailto:tikapramana@gmail.com)

**How to cite this article:** Ayu, P.P, & Septiani, T. (2019). Determinan Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau dari Pendapatan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah. 3 (2). 184-195

## PENDAHULUAN

Keberhasilan dalam membangun perekonomian suatu negara dapat ditinjau dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik menggambarkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat berada dalam kondisi yang baik (Mahadianto et al., 2019). Arah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah mengupayakan agar masyarakatnya memperoleh tingkat pendapatan yang tinggi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat. Suatu wilayah dikatakan baik tingkat kesejahteraannya jika pendapatan

penduduk wilayah tersebut memiliki tingkat pendapatan yang tinggi.

Peningkatan jumlah aktivitas produksi di dalam perekonomian merupakan cerminan dari level pertumbuhan domestik bruto yang dapat dijadikan alat ukur dalam menilai laju tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator yang biasanya digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro dari sisi ekonomi adalah pendapatan per kapita. Berikut ini merupakan tabel pertumbuhan PDRB (produk domestik regional bruto) Per Kapita di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2011-2016.

**Tabel 1. Perkembangan PDRB Per Kapita (Jutaan Rupiah) dari tahun 2011-2016**

Tahun	PDRB Per Kapita (jutaan Rupiah)	Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)
2011	23,25	10,85
2012	25,27	8,69
2013	27,77	9,87
2014	30,11	8,43
2015	32,64	8,43
2016	34,88	6,85

Sumber:(BPS, 2017)

Dari tabel 1, diketahui bahwa secara nominal pendapatan perkapita Provinsi Jawa Barat selalu mengalami peningkatan, akan tetapi pertumbuhan PDRB Jawa Barat selalu menurun. Jika dilihat dari indikator perhitungan PDRB per kapita yang membandingkan pendapatan domestik bruto dengan jumlah penduduk, maka salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun adalah peningkatan PDRB tidak sebanding dengan peningkatan laju penduduk.

Ketimpangan yang terjadi antara PDRB dan laju penduduk, menyebabkan pihak pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Urgensi penelitian dalam jangka pendek ini perlu dilakukan untuk merangsang pihak terkait khususnya pemerintah daerah provinsi Jawa Barat agar lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam jangka

panjang dan berkelanjutan, hasil penelitian ini digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan otonomi daerah mewajibkan pemda untuk lebih memperhatikan kinerja pengelolaan keuangan daerahnya. Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu akuntabilitas dan transparan suatu pengelolaan keuangan daerah merupakan cerminan dari kemandirian suatu pemerintah daerah.

Faktor yang berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi diantaranya pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain yang sah, dan rasio kemandirian daerah. Semakin tinggi PAD, menunjukkan besarnya kontribusi masyarakat dalam membayar pajak daerah, dan retribusi daerah. Hal ini menunjukkan kondisi

pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin membaik.

Pendapatan transfer merupakan pemberian dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Semakin besar pendapatan transfer yang diterima, maka pemerintah daerah memiliki dana yang lebih besar untuk membiayai pembangunan yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pendapatan lain-lain yang sah diantaranya berasal dari hibah. Pendapatan hibah yang diterima oleh pemerintah daerah dapat diperoleh dari masyarakat, organisasi maupun perusahaan. Pemberian hibah ke pemerintah daerah mencerminkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tingkat kemandirian daerah membandingkan pendapatan daerah dengan bantuan dari pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio kemandirian, menunjukkan pemerintah daerah tidak banyak bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Hal ini mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah dan tingkat kemandirian daerah terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

## KAJIAN PUSTAKA

### Stewardship Theory

Penelitian ini berdasarkan Stewardship Theory (Davis et al., 1997). *Stewardship theory* merupakan teori yang menjelaskan situasi manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama bagi kepentingan perusahaan (Kiswanto & Fatmawati, 2019). Pemerintah selaku stewardship dengan fungsi mengelola sumber daya dan rakyat selaku principal berperan sebagai pemilik sumber daya. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan

pemerintah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah, maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi layanan yang diperlukan oleh masyarakat.

### Pertumbuhan Ekonomi

PDRB merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi, yang diprosikan dengan membandingkan pendapatan daerah disuatu wilayah dengan jumlah penduduk wilayah tersebut (*UU No 33 Tahun 2004*, 2004). Sejauh ini pertumbuhan ekonomi hanya melihat perkembangan ekonomi secara fisik tetapi tidak melihat tingkat pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga PDRB yang meningkat belum tentu mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

### Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan lain-lain yang (*UU No 33 Tahun 2004*, 2004)

### Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan - kegiatan daerah tersebut. Oleh karena itu, PAD sebagai sumber utama penerimaan daerah perlu ditingkatkan agar dapat dipergunakan untuk membiayai belanja daerah tersebut, mencakup kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terus - menerus meningkat, sehingga dapat tercipta kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Setiyawati & Hamzah, 2007). Menurut (Nurdiwaty et al., 2017); (Halim, 2004); (Ayu, 2018); (Septiani, 2018) pendapatan daerah merupakan faktor yang paling berperan dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Ayu, 2018; Halim,

2004; Nurdiwaty et al., 2017; Septiani, 2018).

Pendapatan daerah diukur dengan menggunakan PAD yang bersumber dari penjumlahan pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain daerah yang sah.

### **Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer adalah pemindahan dana yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan daerah sehingga otonomi daerah dapat terlaksana dengan baik (Ayu, 2017; Septiani, 2017; *UU No 33 Tahun 2004*, 2004). Otonomi daerah bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan dan efisiensi biaya serta mempersingkat alur birokrasi keuangan daerah. pembagian pendapatan transfer yang tidak proporsional mengakibatkan tingkat kemandirian pemerintah daerah rendah, karena selalu mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat (Setiyawati & Hamzah, 2007).

### **Dana Bagi Hasil**

Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana bagi hasil pajak bersumber dari Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Sedangkan, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan (Rori et al., 2016)

### **Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum digunakan untuk pembelanjaan dalam rangka pemerataan pembangunan yang diterima dari pemerintah pusat (Ayu, 2018; Septiani, 2018).

### **Dana Alokasi Khusus**

Pengertian DAK dalam (*UU No 33 Tahun 2004*, 2004) yaitu dana APBN yang

diperuntukan membiayai kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus tersebut contohnya kebutuhan tak terduga.

### **Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Pendapatan lain-lain yang sah merupakan salah satu komponen yang ada dalam pos pendapatan daerah yang dalam perundang-undangan belum dijelaskan secara rinci jenis pendapatannya, namun selama ini jika ada pendapatan dana darurat, hibah maka akan dikelompokkan dalam pos pendapatan ini (*UU No 33 Tahun 2004*, 2004).

### **Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah**

Menurut (Halim, 2004) rasio kemandirian daerah diukur dengan menghitung besarnya sumber dana dari luar daerah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Jika pemerintah daerah banyak bergantung pada dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dan provinsi, menyebabkan daerah tidak memiliki kemandirian dibidang keuangan maka rasio kemandiriannya rendah. Dalam penerapan otonomi daerah, ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Pola hubungan instruktif, yaitu pemerintah pusat lebih banyak campur tangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga daerah tidak mandiri, (b) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat hanya berupa pemberian konsultasi kepada pemerintah daerah, (c) Pola hubungan partisipatif, yaitu peran pemerintah pusat semakin kecil dalam pengelolaan keuangan daerah karena pemerintah daerah sudah dianggap mampu untuk melaksanakan pengelolaan keuangannya sendiri, (d) Pola hubungan delegatif, yaitu sudah tidak adanya campur tangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah karena daerah sudah sangat mampu melaksanakan otonomi daerahnya (Halim, 2004). Berikut tabel yang menunjukkan kriteria pola hubungan

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah:

**Tabel 2. Kriteria Pola Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultatif
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegatif

Sumber: (Septiani, 2018)

### KERANGKA PEMIKIRAN

Pemerintah daerah sebaiknya lebih memperhatikan pemberdayaan ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga dalam jangka panjang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah. Jika pendapatan daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi – potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian, yang dilakukan oleh (Brata, 2004) dan (Tambunan, 2006) menyatakan pendapatan daerah menyebabkan peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Pendapatan daerah sebenarnya merupakan salah satu faktor dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonomi meningkat berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerahnya.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode verifikatif, yaitu dilakukan dengan menguji pengaruh pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain yang sah dan rasio kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pemerintah daerah Kabupaten dan kota Jawa Barat pada 2012-2017 kecuali Kabupaten Pangandaran, karena

merupakan perluasan Kabupaten Ciamis pada Oktober 2012, sehingga diperoleh 162 sampel data penelitian yang terdiri dari 1 provinsi, 26 kabupaten dan kota selama 6 tahun pengamatan.

### Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa PDRB dan Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, dan tingkat kemandirian daerah yang bersumber dari BPS dan BPK Perwakilan Jawa Barat.

### Variabel Penelitian dan Pengukuran

#### a. Pertumbuhan Ekonomi (Y)

$$\text{Pendapatan per Kapita} = \frac{\text{Pendapatan Domestik Bruto}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Sumber: BPS (2017)

#### b. Pendapatan Asli Daerah (X1)

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$$

Sumber: UU No 33 Tahun 2004

#### c. Pendapatan Transfer (X2)

$$\text{Pendapatan Transfer} = \text{Dana Bagi Hasil Pajak} + \text{Dana Bagi Hasil Bukan Pajak} + \text{Dana Alokasi Umum} + \text{Dana Alokasi Khusus}$$

Sumber : Ayu (2018)

**d. Lain-Lain Pendapatan yang Sah (X3)**

Lain-lain pendapatan yang sah = Pendapatan Hibah +  
Pendapatan Dana Darurat +  
Pendapatan Lainnya

Sumber : Septiani (2018)

Indikator Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$Rasio\ KKD\ 100\% = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}}$$

Sumber: Septiani (2018)

**Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan

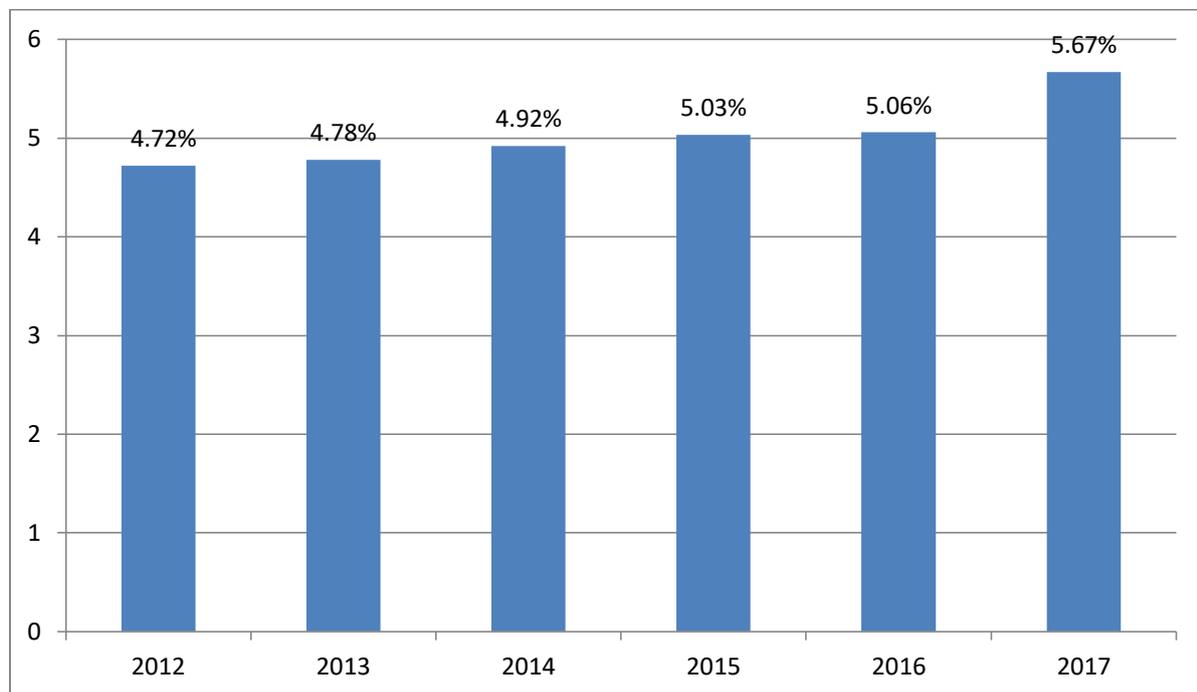
analisis regresi berganda yang sebelumnya diuji menggunakan uji asumsi klasik. Berikut persamaan regresi dalam penelitian ini:

$$PE = a + b_1 PAD + b_2 PT + b_3 PLYS + b_4 RKD + e$$

**Hasil dan Pembahasan**

**Hasil Analisis Data  
Pertumbuhan Ekonomi**

Pembangunan perekonomian kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan secara optimal yang ditunjukkan antara lain dengan produk domestik regional bruto (PDRB) dan capaian Laju pertumbuhan Ekonomi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.



Gambar 1. Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi TA 2012-2017

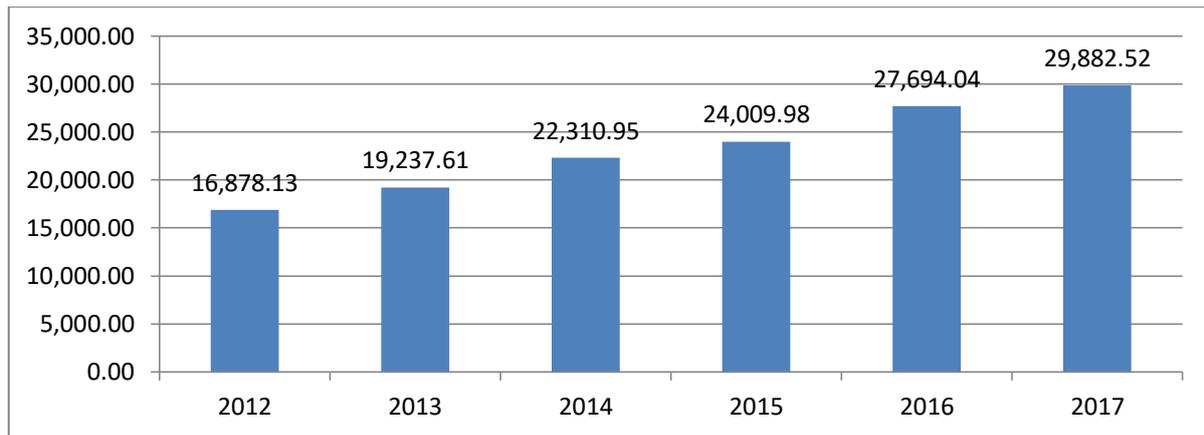
Sumber: data sekunder diolah (2019)

**Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah adalah pendapatan daerah tersebut yang dipergunakan untuk membiayai belanja daerahnya. Transaksi pendapatan tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan

dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa.

Selain itu transaksi pendapatan tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.



Gambar 2. Realisasi Pendapatan TA 2012-2017

### Rasio Tingkat Kemandirian Daerah

Rasio tingkat kemandirian daerah menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah melakukan pengelolaan keuangan daerah tanpa bergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat/ provinsi. Rasio ini diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan total pendapatan yang diterima pemerintah daerah.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak.

Model penelitian yang baik harus memiliki data yang berdistribusi normal. Salah satu cara untuk menilai apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara analisis statistik.

Analisis statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data dikatakan terdistribusi normal apabila hasil pengujian menunjukkan nilai residual memiliki nilai Asymp. Sig. diatas 5% (Ghozali, 2013 : 165). Uji ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Analisis Statistik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			162
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.57872601
Most Extreme Differences	Absolute		.125
	Positive		.125
	Negative		-.113
Kolmogorov-Smirnov Z			.684
Asymp. Sig. (2-tailed)			.737
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.695 <sup>c</sup>
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.683
		Upper Bound	.706

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan hasil uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov/ K-S) pada tabel diatas, nilai residual dari variabel yang

digunakan dalam penelitian memiliki probabilitas sig. 0.706, nilainya diatas tingkat signifikan yang ditetapkan yaitu

sebesar 0.05 atau 5%. Sedangkan nilai Kolmogorov-Smirnov Z adalah 0.684, nilai Asym. Sig. (2-tailed) 0.737, dengan demikian Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Pendapatan lain-lain yang sah dan Rasio Kemandirian Daerah serta Pertumbuhan Ekonomi berdistribusi

normal dan selanjutnya dapat digunakan untuk perhitungan analisis regresi.

**Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi yang digunakan oleh peneliti adalah *Run Test*.

**Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi**

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-.08816
Cases < Test Value	15
Cases >= Test Value	15
Total Cases	30
Number of Runs	11
Z	-1.672
Asymp. Sig. (2-tailed)	.094

a. Median

*Sumber: Hasil Output SPSS*

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai test -0.01299 dengan Asymp. Sig. (2-tailed) dari Run Test sebesar 0.094, lebih besar dari nilai sig 0.05 atau 5%.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas yang digunakan oleh peneliti menggunakan uji glejser. Model data penelitian yang baik adalah model yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	.333	.131		2.544	.017
	PAD	.000	.000	-.157	-1.132	.268
	PT	.001	.006	.021	.112	.912
	PLYS	.005	.001	.715	3.838	.175
	RKD	.004	.003	.612	2.222	.343

a. Dependent Variable: AbsUt

*Sumber: Hasil Output SPSS*

Berdasarkan tabel diatas, keempat variabel independen tidak memiliki heteroskedastisitas.

**Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas menguji korelasi diantara variabel bebas (independen). Data

penelitian tidak boleh memiliki multikolinearitas diantara variabel bebas (independen). Berikut ini merupakan hasil multikolinearitas:

**Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.497	.333		1.491	.149		
PAD	.001	.001	-.152	-.746	.003	.913	1.095
PT	.012	.018	-.180	-.660	.004	.513	1.948
PLYS	.002	.003	-.122	-.461	.001	.545	1.834
RKD	.511	.021	-.143	-.432	.001	.554	1.777

a. Dependent Variable: PertumbuhanEkonomi

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Varian Inflation Factor (VIF) untuk variabel PAD, PT, PLYS, RKD nilainya kurang dari 10 dan nilai tolerance = 0.10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonearitas antar variabel independen.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut dibawah ini hasil analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh Pendapatan asli Daerah (PAD), PT, PLYS, RKD terhadap pertumbuhan ekonomi:

**Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.497	.333		1.491	.149
PAD	.001	.001	-.152	-.746	.003
PT	.012	.018	-.180	-.660	.004
PLYS	.002	.003	-.122	-.461	.001
RKD	.511	.021	-.143	-.432	.001

a. Dependent Variable: PertumbuhanEkonomi

Sumber: Hasil Output SPSS

Dari table diatas, maka dapat diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = 0.497 + 0.001\text{PAD} + 0.012\text{PT} + 0.002\text{PLYS} + 0.511\text{RKD} + e$$

### Pembahasan

#### Pengaruh PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan nilai signifikansi di tabel 7, variable Pendapatan Asli daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,003. Hal itu menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data yang didapat dari BPK perwakilan Jawa Barat selama periode

pengamatan menunjukkan pendapatan asli daerah yang terus meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Meningkatnya PAD, menunjukkan besarnya kontribusi masyarakat dalam membayar pajak daerah, dan retribusi daerah. Hal ini menunjukkan kondisi pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin membaik.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jambi et al., 2014) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

### Pengaruh pendapatan transfer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan nilai signifikansi di tabel 7, variable Pendapatan Transfer memiliki nilai signifikansi sebesar 0,004. Hal itu menunjukkan bahwa Pendapatan transfer berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Setiyawati & Hamzah, 2007) yang menyatakan bahwa pendapatan transfer berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

### Pengaruh pendapatan lain-lain yang sah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan nilai signifikansi di tabel 7, variable Pendapatan lain-lain yang sah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001. Hal itu menunjukkan bahwa Pendapatan lain-lain yang sah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan lain-lain yang sah salah satunya diperoleh dana hibah. Pendapatan hibah yang diterima oleh pemerintah daerah dapat diperoleh dari masyarakat, organisasi maupun perusahaan. Pemberian hibah ke pemerintah daerah mencerminkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian (Nurdiwaty et al., 2017) yang menyatakan bahwa pendapatan lain-lain yang sah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian, (Harianto & Adi, 2007) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian

daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

### Pengaruh Rasio kemandirian Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan nilai signifikansi di tabel 7, variable rasio kemandirian daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001. Hal itu menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu tujuan utama dari otonomi daerah adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali pendapatan daerahnya. Jika pendapatan daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi. Peningkatan pendapatan daerah menunjukkan adanya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan ekonomi daerah. Tingginya pendapatan daerah akan membuat pemerintah memiliki dana yang cukup untuk membangun infrastruktur untuk pembangunan daerah. Salah satu tugas pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah memerlukan pendapatan daerah sebagai bentuk kemandirian keuangan di era otonomi daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinan ( $R^2$ ) dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) sampai 1 ( $0 < R^2 < 1$ ). Berikut ini merupakan hasil uji koefisien determinasi:

**Tabel 8. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi**

Model	Model Summary <sup>b</sup>			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.225 <sup>a</sup>	.050	.463	.6192804

a. Predictors: (Constant), PAD, PT, PLYS, RKD

b. Dependent Variable: PertumbuhanEkonomi

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini, berpengaruh sebesar 46.3 % sedangkan 53.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji statistik dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa (a) Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota Se-Provinsi Jawa Barat, (b) Pendapatan transfer mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Barat secara signifikan, (c) pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota Se-Provinsi Jawa Barat dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan lain-lain yang sah, (d) pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh Rasio tingkat Kemandirian daerah.

Implikasi dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Barat dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, Pendapatan transfer, pendapatan lain-lain yang sah dan peningkatan rasio kemandirian daerah.

### Saran

Penelitian hanya dilakukan di kabupaten dan kota se provinsi jawa barat selama 6 tahun, sehingga belum mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode pengamatan, populasi dan sampel penelitian, serta variabel independen lainnya seperti inflasi, belanja daerah yang diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

Ayu, P. P. (2017). Analisis Faktor-Faktor Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Ekspansi*, 9(2),

187–198.

Ayu, P. P. (2018). Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 3(1), 80.

<https://doi.org/10.29407/jae.v3i1.12007>

BPS. (2017). *pertumbuhan ekonomi jawa barat*.

Halim, A. (2004). *mananejemen keuangan daerah*. akademi manajemen perusahaan YKPN.

Harianto, D., & Adi, P. H. (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita. *Jurnal Dan Prosiding SNA - Simposium Nasional Akuntansi*, 10.

Jambi, K., Ariansyah, M., Amir, A., & Achmad, E. (2014). *Jurnal Ariansyah (Hal 159 - 164)*. 1(3), 159–164.

James H. Davis, F. David Schoorman, & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *The Academy of Management Review*, 22(1), 20–47.

Kiswanto, K., & Fatmawati, D. (2019). Determinan Kinerja Pemerintah Daerah: Ukuran Pemda, Leverage, Temuan Audit dan Tindak Lanjutnya. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 44–54.

Mahadianto, M. Y., Siregar, N. F., Rahayu, D. B., Muna, A., & Musyaffi, A. M. (2019). Could Economic Growth and Inflation Affect the Acceptance of Value Added Taxes? *1st International Conference on Economics, Business, Entrepreneurship, and Finance (ICEBEF 2018)*.

Nurdiwaty, D., Zaman, B., & Kristinawati, E. (2017). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal di kabupaten/kota Jawa Timur. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17(1), 43–59. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol17.iss1.art3>

Rori, C. F., Luntungan, A. Y., Niode, A. O.,

- Pembangunan, J. E., & Ekonomi, F. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 243–254.
- Septiani, T. (2017). Analisis Peran Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Indeks Tata Kelola Pemerintahan. *Ekspansi*, 9(2), 265–274.
- Septiani, T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemandirian Pemerintahan Kabupaten dan Kota Cirebon. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi ( JAE )*, 3(1), 97–112.
- Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211–228. <https://doi.org/10.21002/jaki.2007.11>
- UU No 33 Tahun 2004. (2004).